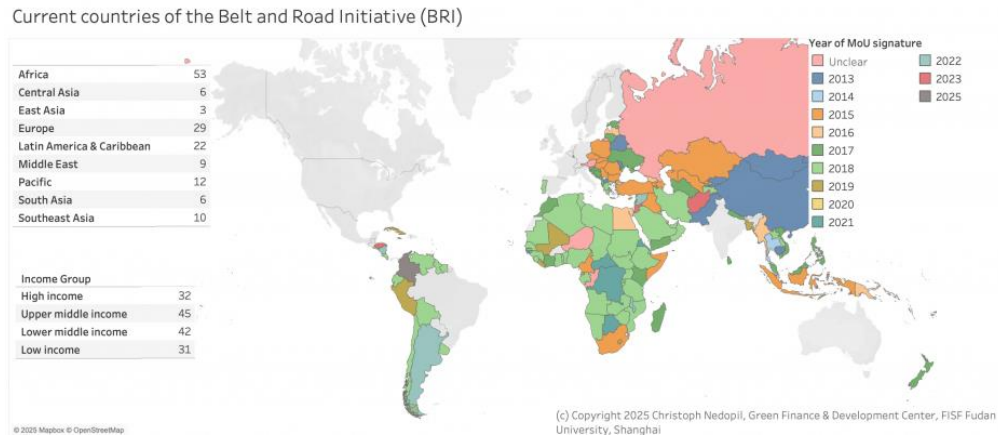


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Belt and Road Initiative (BRI) merupakan inisiatif strategis yang diumumkan Tiongkok pada tahun 2013 untuk membangun konektivitas lintas benua antara Asia, Afrika, dan Eropa melalui pengembangan jaringan infrastruktur darat dan maritim. Inisiatif ini tidak hanya diarahkan pada peningkatan konektivitas transportasi, tetapi juga pada pembentukan jalur ekonomi global yang menghubungkan Tiongkok dengan berbagai kawasan strategis dunia (Wulandari & Inayah, 2021). Seiring perkembangannya, BRI telah melibatkan sekitar 146–150 negara melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding* atau MoU), yang menunjukkan luasnya jangkauan kerja sama yang dibangun Tiongkok (Greenfde, 2025). Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa BRI tidak semata dipahami sebagai proyek pembangunan infrastruktur, melainkan juga sebagai instrumen strategis Tiongkok untuk memperluas keterlibatan ekonomi dan memperkuat posisinya dalam hubungan internasional



Gambar 1. 1 Peta Negara Anggota BRI

Sumber: Greenfdc, 2025

Keterlibatan Tiongkok dalam berbagai proyek infrastruktur di negara berkembang, termasuk Ethiopia, didorong oleh kepentingan ekonomi dan politik yang saling berkaitan. Dari sisi ekonomi, Tiongkok berkepentingan memperluas akses pasar dan memperkuat jaringan perdagangan global, terutama di negara-negara dengan potensi pertumbuhan tinggi. Ethiopia menunjukkan karakteristik tersebut dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 10,1 persen per tahun pada periode 2010–2017, sehingga menempatkannya sebagai salah satu pasar berkembang yang menarik (United States Government, 2017). Di sisi lain, keterlibatan dalam pembiayaan dan pembangunan infrastruktur juga memperkuat posisi ekonomi Tiongkok melalui peningkatan aktivitas investasi dan perdagangan. Secara politik, kerja sama infrastruktur memungkinkan Tiongkok memperluas pengaruh serta mempererat

hubungan strategis jangka panjang dengan negara mitra. Kepentingan ekonomi dan politik inilah yang mendorong Tiongkok memanfaatkan BRI sebagai kerangka utama dalam merealisasikan ekspansi globalnya.

Dalam konteks tersebut, kondisi domestik Ethiopia memberikan peluang konkret bagi realisasi kepentingan Tiongkok. Sebagai negara tanpa akses laut (*landlocked state*), Ethiopia bergantung pada Pelabuhan Djibouti yang menangani lebih dari 90 persen arus perdagangan internasionalnya (International Trade Administration, 2024). Namun, keterbatasan infrastruktur transportasi menyebabkan distribusi barang berjalan tidak efisien, ditandai dengan waktu tempuh yang panjang dan biaya logistik yang tinggi, yaitu sekitar 22–27 persen dari harga akhir produk (PPIAF, 2020). Kondisi ini tidak hanya menghambat aktivitas ekonomi domestik Ethiopia, tetapi juga menciptakan kebutuhan mendesak terhadap pembangunan sistem transportasi yang lebih modern dan efisien. Situasi tersebut membuka ruang bagi Tiongkok untuk merealisasikan kepentingannya melalui penyediaan infrastruktur yang mendukung konektivitas perdagangan regional.

Berdasarkan kondisi tersebut, Tiongkok merealisasikan keterlibatannya melalui pembangunan Jalur Kereta Api Addis Ababa–Djibouti atau *Addis Ababa-Djibouti Railway* (AADR) sepanjang 756 kilometer yang mulai beroperasi pada tahun 2018 (PPIAF, 2020). Proyek ini meningkatkan efisiensi distribusi barang serta memperkuat konektivitas antara pusat ekonomi Ethiopia dan pelabuhan utama di Djibouti. Lebih dari sekadar solusi infrastruktur, pembangunan jalur kereta api ini

menunjukkan bagaimana BRI digunakan sebagai instrumen untuk mewujudkan kepentingan Tiongkok. Dari sisi ekonomi, proyek tersebut memperlancar arus perdagangan dan memperkuat keterlibatan ekonomi Tiongkok di Ethiopia. Dari sisi politik, keterlibatan dalam proyek strategis ini memperkuat pengaruh Tiongkok sekaligus memperdalam hubungan bilateral dengan negara mitra. Oleh karena itu, pembangunan AADR tidak dapat dipahami hanya sebagai proyek pembangunan, tetapi juga sebagai manifestasi konkret kepentingan ekonomi dan politik Tiongkok dalam kerangka BRI.

Penelitian sebelumnya telah memberikan wawasan yang signifikan mengenai program BRI. Hairisa dan Farid (2023) menyelidiki rasionalitas Ethiopia dalam menghadapi dukungan Tiongkok, menunjukkan manfaat dan tantangan yang dihadapi kedua negara. Pitaloka (2023) menyelidiki kepentingan nasional Tiongkok dalam proyek jalur kereta api Addis Ababa-Djibouti, sementara Kuswoyo (2023) menganalisis dampak sosial dan lingkungan proyek tersebut. Meskipun studi-studi ini memberikan gambaran yang jelas terkait proyek ini, masih terdapat kesenjangan penelitian, terutama dalam investigasi mendalam mengenai implementasi BRI dalam pembangunan infrastruktur kereta api di Ethiopia, khususnya pada jalur kereta api Addis Ababa-Djibouti. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengisi kesenjangan tersebut dengan memberikan analisis lebih mendalam mengenai Implementasi BRI Tiongkok sebagai *Foreign Aid* kepada Ethiopia dalam pembangunan infrastruktur kereta api pada jalur Addis Ababa-Djibouti tahun 2011-2018.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang di atas, dapat diambil suatu rumusan masalah yaitu bagaimana implementasi *Belt and Road Initiative* Tiongkok sebagai *foreign aid* kepada Ethiopia dalam pembangunan infrastruktur kereta api pada jalur Addis Ababa-Djibouti tahun 2011-2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu tujuan secara umum dan secara khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk memenuhi persyaratan kelulusan serta memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan penelitian ini secara khusus adalah untuk menganalisis bagaimana implementasi BRI Tiongkok sebagai *foreign aid* kepada Ethiopia dalam pembangunan infrastruktur kereta api pada jalur Addis Ababa-Djibouti tahun 2011-2018.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 *Foreign Aid*

Lancaster (2007), menyatakan bahwa bantuan luar negeri merupakan konsep yang kompleks dan memiliki banyak dimensi dalam praktik hubungan internasional. Bantuan luar negeri tidak selalu dianggap sebagai kebijakan, tetapi sering dipandang sebagai instrumen untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri yang lebih luas. Dalam pandangan yang lebih umum, istilah ini kadang mencakup seluruh bentuk transfer publik antarnegara, termasuk pengeluaran perdagangan dan militer di luar negeri. Akan tetapi, definisi konvensional dari *foreign aid* sebenarnya jauh lebih sempit karena hanya mencakup bentuk bantuan yang secara eksplisit ditujukan untuk tujuan pembangunan dan kesejahteraan manusia di negara penerima (Lancaster, 2007).

Menurut Lancaster (2007), bantuan luar negeri didefinisikan sebagai transfer sumber daya pemerintah secara sukarela dari satu pemerintah kepada pemerintah independen lainnya, lembaga swadaya masyarakat, atau organisasi internasional seperti Bank Dunia dan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP). Tujuan utama dari transfer ini adalah untuk meningkatkan kondisi manusia di negara penerima, bukan untuk memperoleh keuntungan ekonomi atau militer secara langsung. Definisi tersebut juga sejalan dengan pandangan umum di banyak negara berkembang yang menganggap bantuan luar negeri sebagai bentuk solidaritas global yang berorientasi pada pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan. Dengan

demikian, *foreign aid* diposisikan sebagai mekanisme strategis dalam arsitektur pembangunan internasional modern (Lancaster, 2007).

“Aid can be in the form of cash (grants or concessional loans), in kind (e.g., food aid), or in the form of debt relief. These transfers can fund a diverse set of activities: budgetary and balance of payments needs in recipient countries, investment projects and research activities, economic or political reform programs, technical advice and training, and humanitarian relief” (Lancaster, 2007, hlm. 11).

Berdasarkan kutipan diatas, Lancaster (2007) mengklasifikasikan *foreign aid* dari negara donor kepada negara penerima ke dalam tiga kategori utama yaitu *cash*, *in-kind*, dan *debt relief*. Pada bentuk *cash*, ia menjelaskan bahwa bantuan ini terdiri atas *grants* dan *concessional loans*. Sementara itu, bentuk kedua yaitu *in-kind*, hanya diberikan contoh oleh Lancaster seperti *food aid* tanpa penjelasan definisi secara spesifik (Lancaster, 2007). Berdasarkan sumber lain, Menurut Hashimzade, Myles, dan Black (2017) mendeskripsikan *in-kind aid* sebagai bantuan yang diberikan dalam bentuk barang atau jasa, bukan dalam bentuk uang tunai (Hashimzade dkk., 2017). Adapun bentuk ketiga, yaitu *debt relief*, juga tidak dijelaskan lebih rinci oleh Lancaster. Literatur lain seperti Dimitriu (2011) mendefinisikan *debt relief* sebagai penghapusan sebagian atau seluruh utang yang dimiliki oleh individu, perusahaan, atau negara (Dimitriu, 2011). Namun, pada penelitian ini, analisis difokuskan pada dua bentuk

bantuan luar negeri, yaitu *cash* dalam bentuk *concessional loans* dan *in-kind aid* dalam bentuk jasa.

Menurut Lancaster (2007), ketiga bentuk bantuan luar negeri pada prinsipnya digunakan untuk mendanai berbagai jenis aktivitas di negara penerima, meliputi *budgetary and balance-of-payments needs*, *investment projects and research*, *economic or political reform programs*, *technical advice and training*, serta *humanitarian relief*. Aktivitas *budgetary and balance-of-payments needs* merujuk pada bantuan yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan anggaran pemerintah serta merespons tekanan pada neraca pembayaran ketika negara penerima mengalami keterbatasan fiskal, sementara *investment projects and research* mencakup dukungan terhadap proyek investasi dan kegiatan penelitian, termasuk survei dan studi kelayakan, yang penting dalam proses pengambilan keputusan pembangunan. Selanjutnya, *economic or political reform programs* diarahkan untuk mendorong perubahan atau penyesuaian dalam kebijakan ekonomi maupun struktur politik negara penerima, sedangkan *technical advice and training* meliputi bantuan teknis melalui penyediaan tenaga ahli dan pelatihan guna memperkuat kapasitas administratif atau sektoral negara penerima. Adapun *humanitarian relief* ditujukan untuk merespons situasi darurat seperti bencana alam, konflik, kelaparan, dan kondisi kemanusiaan kritis lainnya (Lancaster, 2007). Dalam penelitian ini, analisis difokuskan pada dua jenis aktivitas bantuan luar negeri, yakni *investment projects and research* serta *technical advice and training*.

Lebih lanjut, Lancaster (2007) menegaskan bahwa bentuk transfer bantuan luar negeri dari negara donor ke negara penerima tidak terikat pada satu jenis aktivitas tertentu, sebagaimana dinyatakan bahwa “*these transfers can fund a diverse set of activities*” (hlm. 11). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bantuan luar negeri tidak dibatasi penggunaannya pada aktivitas spesifik tertentu. Dengan demikian, setiap bentuk bantuan, baik *cash*, *in-kind*, maupun *debt relief*, dapat digunakan secara fleksibel untuk mendanai berbagai aktivitas di negara penerima (Lancaster, 2007). Mengacu pada kerangka tersebut, penelitian ini memfokuskan penggunaan bantuan dalam bentuk *cash* untuk mendanai aktivitas *investment projects and research*, serta bantuan dalam bentuk *in-kind* untuk mendukung aktivitas *technical advice and training*.

“Aid can permit a recipient government to expand activities that help realize the purposes of the aid. For instance, it can increase investments in infrastructure, provide relief to a suffering population, or ease the budgetary burdens of military expenditures. Alternatively, aid can expand the capacity of a recipient government to act in ways that enable it to use all its resources more productively. For example, aid can provide training and advice to government officials in budgeting, auditing, program management, planning, and a host of other technical and managerial areas. Third, aid can act as an incentive or as a payment for recipients to act in ways favored by the donor by

conditioning it on desired behavior on the part of the recipient (e.g., adopting economic policy reforms or supporting the donor government's positions in international forums) or reducing or eliminating it when recipients behave in ways unwelcome to the aid-giving government" (Lancaster, 2007, hlm. 11).

Berdasarkan kutipan tersebut, menurut Lancaster (2007), bantuan luar negeri yang diberikan oleh negara donor kepada pemerintah negara penerima memiliki tiga fungsi utama, yaitu *expanding activities*, *expanding capacity*, dan *incentive or payment* (Lancaster, 2007). Fungsi *expanding activities* merujuk pada peran bantuan dalam memungkinkan pemerintah penerima memperluas atau meningkatkan berbagai aktivitas yang mendukung tujuan bantuan, termasuk peningkatan investasi infrastruktur, pemberian bantuan kepada masyarakat yang mengalami penderitaan, serta pengurangan beban anggaran pemerintah, termasuk pengeluaran militer. Fungsi *expanding capacity* menunjukkan bahwa bantuan dapat meningkatkan kapasitas pemerintah penerima untuk bertindak secara lebih efektif dan produktif melalui pelatihan serta pemberian nasihat teknis kepada pejabat pemerintah, khususnya dalam bidang penganggaran, audit, manajemen program, perencanaan, serta berbagai aspek teknis dan manajerial lainnya. Sementara itu, fungsi *incentive or payment* menempatkan bantuan sebagai instrumen insentif atau bentuk pembayaran dengan cara mengondisikan pemberiannya pada perilaku tertentu yang diinginkan oleh negara donor, seperti penerapan reformasi kebijakan ekonomi atau dukungan terhadap posisi

donor dalam forum internasional, serta dengan mengurangi atau menghentikan bantuan apabila pemerintah penerima bertindak tidak sesuai dengan preferensi negara pemberi bantuan (Lancaster, 2007).

Sebagaimana dikemukakan oleh Lancaster (2007), pada fungsi *expanding activities*, bantuan dapat memperluas aktivitas pemerintah penerima melalui berbagai cara, seperti peningkatan investasi infrastruktur, pemberian bantuan kemanusiaan, serta pengurangan beban anggaran militer, yang selaras dengan jenis aktivitas *investment projects and research activities, humanitarian relief*, serta *budgetary and balance-of-payments needs*. Fungsi *expanding capacity* diwujudkan melalui pemberian pelatihan dan nasihat kepada pejabat pemerintah dalam berbagai aspek teknis dan manajerial, yang menunjukkan keterkaitan langsung dengan aktivitas *technical advice and training* (Lancaster, 2007). Sementara itu, fungsi *incentive or payment* dipahami sebagai bantuan yang dikondisikan pada perilaku tertentu dari negara penerima, sebagaimana dinyatakan oleh Lancaster bahwa bantuan dapat “*conditioning it on desired behavior on the part of the recipient*” (Lancaster, 2007, hlm. 11). Oleh karena itu, fungsi *incentive or payment* tidak melekat pada satu jenis aktivitas tertentu, melainkan bersifat lintas aktivitas dan dapat diterapkan pada berbagai bentuk bantuan serta aktivitas yang didanai. Mengacu pada kerangka tersebut, penelitian ini memfokuskan perhatian pada aktivitas *investment projects and research*, khususnya peningkatan investasi infrastruktur sebagai representasi fungsi *expanding activities*, serta aktivitas *technical advice and training* sebagai representasi

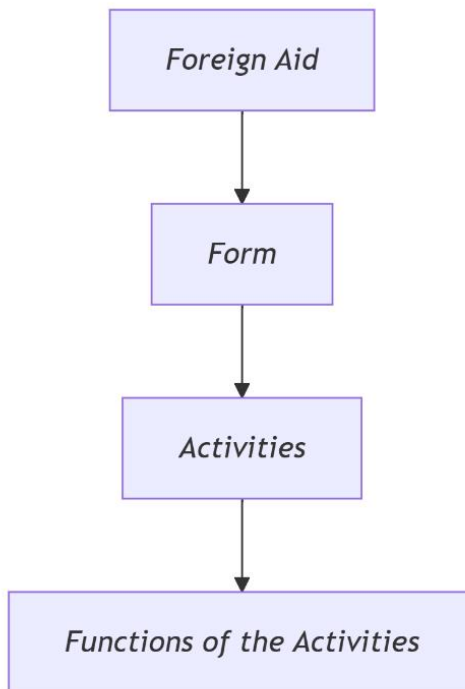
fungsi *expanding capacity*, di mana kedua aktivitas tersebut juga relevan dengan fungsi *incentive or payment*.

“Why do governments give aid? In answering that question, some talk about ‘motivations’ or ‘rationales.’ But motivations involve individuals and can be difficult to observe, while rationales may not reflect intent. In this book, I shall analyze aid’s ‘purposes,’ the broad goals that donor governments sought to achieve with their aid, evident not only in what they said the goals of their aid were but in the decisions they made on its amount, country, location, and use. For much of the period of this study, foreign aid was used for four main purposes: diplomatic, developmental, humanitarian relief, and commercial” (Lancaster, 2007, hlm. 12-13).

Dalam kutipan diatas, Lancaster (2007) menekankan bahwa untuk memahami alasan pemerintah memberikan bantuan luar negeri, pendekatan yang tepat bukanlah melalui *motivations* atau *rationales*, karena *motivations* bersifat individu dan sulit diamati, sedangkan *rationales* mungkin tidak mencerminkan niat sebenarnya. Lancaster lebih menekankan pada *purposes*, yaitu tujuan luas yang ingin dicapai oleh pemerintah donor dengan bantuan mereka. Tujuan ini dapat dilihat tidak hanya dari apa yang dinyatakan secara resmi oleh donor, tetapi juga dari keputusan terkait jumlah bantuan, alokasi negara penerima, dan cara penggunaannya. Selama periode studi yang dibahas, bantuan luar negeri diarahkan untuk empat tujuan utama yaitu diplomatik,

pembangunan, bantuan kemanusiaan, dan komersial, sementara tujuan budaya juga ada namun kurang menonjol (Lancaster, 2007). Penelitian ini akan difokuskan pada analisis implementasi bantuan luar negeri. Sehingga, penelitian ini hanya menelaah bentuk, jenis aktivitas, dan fungsi aktivitas bantuan luar negeri di negara penerima.

1.5 Sintesa Pemikiran



Gambar 1. 2 Bagan Sintesa Pemikiran

Catatan: Diolah oleh penulis

Bagan sintesa pemikiran dalam penelitian ini disusun berdasarkan kerangka pemikiran yang menempatkan *foreign aid* sebagai bantuan luar negeri dari negara donor kepada negara penerima, yang disalurkan melalui dua bentuk utama, yaitu *cash*

dan *in-kind*. Dalam kerangka tersebut, bantuan *cash* diarahkan untuk mendanai aktivitas *investment projects and research*, sedangkan bantuan *in-kind* digunakan untuk mendukung aktivitas *technical advice and training*. Kedua jenis aktivitas ini merepresentasikan fungsi bantuan luar negeri yang berbeda, di mana *investment projects and research* mencerminkan fungsi *expanding activities*, sementara *technical advice and training* mencerminkan fungsi *expanding capacity*. Selain itu, kedua aktivitas tersebut juga berfungsi sebagai *incentive or payment*, karena pemberian bantuan dapat dikondisikan untuk mendorong perilaku tertentu dari negara penerima sesuai dengan preferensi negara donor.

1.6 Argumen Utama

Penulis berargumen bahwa proyek pembangunan AADR dikategorikan sebagai *foreign aid* dari Tiongkok yang mencakup dua bentuk bantuan, yaitu *cash* dan *in kind*. Pada bentuk *cash* terdapat dua kategori, yakni *grants* dan *concessional loans*, namun penelitian ini berfokus pada bentuk *concessional loans* yang dibuktikan melalui perjanjian resmi antara pemerintah Tiongkok dan pemerintah Ethiopia serta Djibouti. Penandatanganan perjanjian pinjaman *buyer's credit loan* dilakukan pada 15 Mei 2013 antara China Eximbank dan Pemerintah Ethiopia dengan nilai 2,49 miliar dolar Amerika Serikat, diikuti perjanjian serupa antara China Eximbank dan Kementerian Keuangan Djibouti senilai 491 juta dolar Amerika Serikat pada 22 Mei 2013. Dalam bentuk *in kind*, bantuan difokuskan pada kategori jasa yang dibuktikan melalui penempatan tenaga kerja Tiongkok di jalur kereta, pembimbingan pegawai lokal

melalui sistem “*master-apprentice*,” serta penyelenggaraan pelatihan institusi dan penyusunan buku teknis.

Kedua bentuk *foreign aid* diatas digunakan untuk mendanai berbagai jenis aktivitas yang meliputi *investment projects and research* serta *technical advice and training*. Pada *investment projects and research*, *foreign aid* dimanfaatkan sebagai sumber pendanaan investasi infrastruktur perkeretaapian lintas negara melalui skema pinjaman konsesional. Pembiayaan tersebut diarahkan secara spesifik untuk pembangunan AADR, pengadaan sarana perkeretaapian, serta pembentukan sistem operasional yang terintegrasi, sebagaimana direalisasikan melalui kontrak-kontrak EPC di Ethiopia dan Djibouti. Dengan demikian, *foreign aid* berfungsi menghasilkan aset fisik permanen berupa sistem perkeretaapian modern yang memperluas kapasitas transportasi dan logistik lintas negara. Sementara itu, pada *technical advice and training*, bantuan diberikan melalui pelatihan operasional, pemeliharaan kereta, pelatihan teknik, pelatihan formal, dan pemberian sertifikat kualifikasi kerja kepada pegawai Ethiopia. Serangkaian pelatihan ini memastikan adanya transfer keterampilan untuk mendukung keberlanjutan pengoperasian proyek.

Kedua jenis aktifitas diatas nantinya memiliki tiga fungsi utama yaitu *expanding activities*, *expanding capacities*, dan *incentive/payment*. Proyek ini memenuhi fungsi *expanding activities* karena dukungan finansial dan material dari Tiongkok memungkinkan Ethiopia dan Djibouti membangun infrastruktur transportasi berskala besar yang tidak dapat mereka biayai secara mandiri. Bantuan tersebut memperluas

aktivitas pembangunan melalui penyediaan jaringan logistik modern, pengurangan biaya transportasi, dan peningkatan mobilitas barang serta penumpang. Proyek ini juga memenuhi fungsi *expanding capacities* karena pelatihan teknis, pendampingan profesional, transfer pengetahuan, dan penyusunan kurikulum teknis telah meningkatkan kapasitas pemerintah Ethiopia dalam mengoperasikan dan mengelola sistem perkeretaapian. Selain itu, bantuan berfungsi sebagai *incentive/payment*, tercermin dalam reformasi kebijakan investasi, pembangunan kawasan industri strategis, dan modernisasi prosedur kepabeanan yang menyesuaikan kebijakan domestik Ethiopia dengan kepentingan Tiongkok.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam tipe penelitian deskriptif. Menurut Vardiansyah (2008), penelitian deskriptif bertujuan untuk mengolah dan menyajikan data secara sistematis dan akurat, sehingga informasi yang diperoleh dapat dipahami oleh berbagai pihak, termasuk mereka yang tidak mengalami peristiwa secara langsung. Pendekatan ini menekankan penggambaran fakta dan fenomena sesuai kondisi nyata, tanpa melakukan manipulasi terhadap data, sehingga memungkinkan penyajian gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai objek atau subjek yang dikaji. Jenis penelitian deskriptif memberikan penjelasan yang rinci, kontekstual, dan faktual terhadap fenomena yang menjadi fokus kajian (Vardiansyah, 2008). Penelitian ini termasuk

kualitatif deskriptif karena penulis fokus menganalisis implementasi BRI sebagai *foreign aid* Tiongkok kepada Ethiopia dalam Pembangunan infrastruktur AADR dengan penyajian data secara naratif, rinci, kontekstual, dan faktual, tanpa adanya manipulasi data, sesuai dengan prinsip kualitatif deskriptif yang telah dijelaskan di atas.

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Penulis menetapkan batasan waktu penelitian agar analisis dapat lebih terfokus dan mendalam. Rentang waktu penelitian dimulai pada 2011 dan berakhir pada 2018. Penelitian dimulai pada tahun 2011 karena pada saat itu *China Eximbank* dan ERC menandatangani perjanjian pinjaman untuk proyek AADR, sekaligus ERC memberikan kontrak pembangunan kepada dua perusahaan milik negara China, yaitu CREC dan CRCC. Penelitian berakhir pada tahun 2018 karena pada periode tersebut ERC mengambil alih pengoperasian jalur kereta api dari CREC dan jalur kereta api secara resmi diresmikan untuk layanan komersial. Selain itu, jangkauan penelitian difokuskan pada analisis bantuan luar negeri berupa pinjaman, mengingat proyek kereta api ini merupakan bagian dari skema pinjaman dan tidak termasuk kategori bantuan barang, maupun keringanan utang.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder. Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah dipublikasikan dalam berbagai bentuk. Sumber data sekunder meliputi buku, jurnal, dokumen, majalah,

koran, teks internet, dan lain-lain (Singarimbun, 1995). Selain sumber-sumber yang beragam tersebut, penulis akan mengumpulkan data melalui penelusuran online. Metode penelusuran data internet adalah prosedur pencarian data melalui media online seperti internet dan media jaringan lainnya, yang memungkinkan peneliti untuk menggunakan data informasi online secepat dan semudah mungkin, sekaligus dapat dipertanggung jawabkan secara akademis (Bungin, 2007). Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini memanfaatkan data sekunder melalui studi dokumen yang bersumber dari lembaga dan publikasi resmi, seperti AidData, *Public-Private Infrastructure Advisory Facility* (PPIAF), *China-Africa Research Initiative* (CARI), serta dokumen hukum resmi pemerintah Ethiopia. Sumber-sumber tersebut menyediakan informasi terkait pembiayaan proyek, data teknis proyek, pelatihan dan transfer teknologi, serta kebijakan dan strategi pembangunan dalam kerja sama BRI.

Tabel 1.1 Temuan Data Penelitian

Jenis Data	Sumber Data
Basis data proyek (<i>project record database</i>)	AidData
Laporan studi kasus	<i>Public-Private Infrastructure Advisory Facility</i> (PPIAF)
Dokumen hukum pemerintah	<i>Federal Democratic Republic of Ethiopia</i>

Catatan: Dituliskan oleh penulis berdasarkan penemuan data yang ada

1.7.4 Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif dalam penelitian ini, di mana data kualitatif dipahami sebagai sekumpulan sumber berupa penjelasan, teks, suara,

dan gambar yang digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam. Data tersebut dimanfaatkan untuk menganalisis studi kasus dengan cara menginterpretasikan temuan yang ada, sementara studi kasus sendiri merujuk pada fenomena yang dianalisis berdasarkan berbagai data yang telah dikumpulkan (Creswell, 2017). Dalam konteks penelitian ini, data kualitatif digunakan untuk menjelaskan implementasi BRI sebagai *foreign aid* Tiongkok kepada Ethiopia dalam pembangunan infrastruktur AADR, sehingga penulis dapat mengidentifikasi dan menjelaskan bentuk, mekanisme, serta fungsi bantuan secara rinci dan kontekstual, sekaligus memahami keterlibatan aspek lintas batas negara sesuai dengan konsep *foreign aid*.

175. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini dibagi dalam empat bab, yaitu sebagai berikut.

BAB I memaparkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, serta menjelaskan kerangka pemikiran, argumen utama, metodologi, tipe dan jangkauan penelitian, teknik pengumpulan serta analisis data, dan sistematika penulisan sebagai dasar konseptual dan metodologis penelitian ini.

BAB II membahas bentuk *foreign aid*, yang mencakup *cash* dan *in-kind*, serta berbagai jenis aktivitas, yakni *investment projects and research dan technical advice and training* dalam pembangunan AADR.

BAB III membahas *Functions of the activities*, meliputi *expanding activities*, *expanding capacities*, dan *incentives or payment* dalam pembangunan AADR.

BAB IV menyajikan kesimpulan dan saran berdasarkan analisis pada bab sebelumnya mengenai implementasi *foreign aid* dalam pembangunan AADR.